

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Christine & Meiden, (2021) mengenai pengungkapan SR pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan YTL Corporation Berhad mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap standar GRI dapat bervariasi secara signifikan antara perusahaan, yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh banyak perusahaan dalam memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga hasil penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan standar GRI dalam meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan.

Hasil penelitian Syahputra et al., (2019) menganalisis pengungkapan lingkungan berdasarkan pedoman Global Reporting Initiatives (GRI) G4 pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk untuk tahun 2016-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan kedua perusahaan tergolong 'partially applied' dengan variasi tingkat keluasan dan kedalaman pengungkapan. Penelitian ini menjadi acuan penting untuk mengukur komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan melalui pelaporan keberlanjutan.

Hasil penelitian Dewi & Rustiarini, (2024) tentang *Sustainability Reporting and Firm Value Systematic Literature Review*. menunjukkan bahwa hubungan antara pelaporan keberlanjutan dan nilai perusahaan berbeda-beda. Sebaliknya, perusahaan memiliki berbagai alasan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan nilainya. Perusahaan harus menyeimbangkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi beberapa perusahaan tidak mau mempublikasikan laporan keberlanjutan. Perusahaan lain tidak mengikuti

standar GRI, dan mereka mungkin tidak konsisten dalam pengungkapan. Akibatnya, mereka tidak meningkatkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian Hidayati, (2023) tentang *Sustainability Reporting In Indonesia: A Systematic Literature Review* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tren, kemajuan, dan prospek penelitian masa depan tentang pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, Laporan Keberlanjutan Indonesia telah berkembang menjadi komponen penting dari pelaporan terintegrasi yang menggabungkan parameter keuangan dan non-keuangan. Dengan mengeluarkan standar, pihak berwenang dapat dengan mudah membandingkan laporan keberlanjutan. Termasuk keluarnya peraturan POJK No.05/POJK.03/2017, yang mengatur perusahaan untuk memenuhi kewajiban mereka dan secara sukarela menyajikan laporan keberlanjutan. Dengan perkembangan ini, semakin banyak peneliti yang tertarik untuk membahas laporan keberlanjutan. Studi ini menggunakan alur diagram PRISMA untuk proses review sistematis, dan 31 makalah dimasukkan. Penelitian dilakukan dari 2018–2022.

Hasil penelitian Hidayat *et al.*, (2022) tentang bagaimana pengungkapan laporan keberlanjutan diterapkan pada laporan tahunan perusahaan dan membandingkannya dengan dua perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam industri konsumen tahun 2021, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keberlanjutan Indofood CBP Sukses Makmur dan PT. Unilever Indonesia digunakan sebagian. Selain mencari keuntungan finansial, kedua perusahaan juga menangani konsekuensi dari operasi mereka.

Hasil penelitian Fadilla & Yuliandhari, (2018) tentang Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Report* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Seluruh Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2016). Menunjukkan bahwa Pengungkapan

Sustainability Report memiliki pengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) secara parsial; itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Current Ratio* (CR), tetapi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap *Debt to Equity Ratio* (DER). Pengungkapan *Sustainability Report* juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Inventory Turnover*.

Hasil penelitian Imani *et al.*, (2024) tentang pengungkapan laporan keberlanjutan oleh perusahaan-perusahaan di sektor kecantikan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022. Perusahaan seharusnya tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan. Laporan Keberlanjutan telah menjadi tren dan kebutuhan penting bagi perusahaan yang ingin menyampaikan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya kepada para pemangku kepentingan. Penelitian ini mencakup analisis terhadap PT Mustika Ratu, PT Akasha Wira International, dan PT Kino Indonesia, dengan variabel utama berupa tingkat kepatuhan terhadap pelaporan keberlanjutan. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang diambil langsung dari situs web masing-masing perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Peneliti menggunakan indeks GRI sebagai acuan dalam menilai penerapan laporan keberlanjutan, serta menggunakan metode analisis konten dan perbandingan sebagai teknik analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga perusahaan tersebut secara umum berada dalam kategori baik dalam menerapkan laporan keberlanjutan tahun 2022. Namun, PT Mustika Ratu, PT Akasha Wira International, dan PT Kino Indonesia masih memiliki kekurangan dalam pengungkapan topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial tertentu, dengan sebagian besar informasi yang diungkapkan hanya sebagian atau terbatas.

2.2 Kajian Pustaka

1. *Sustainability Report*

Menurut Association of Chartered Certified Accountants, keberlanjutan mencakup seluruh operasi perusahaan, yang berarti bahwa setiap unit perusahaan harus memiliki kepemilikan sendiri. Dewi & Sudana, (2015) mengatakan bahwa laporan keberlanjutan adalah laporan yang berkonsep pada pengembangan berkelanjutan. Pedoman laporan keberlanjutan menyatakan bahwa laporan keberlanjutan dibuat untuk mengukur, mengungkapkan, dan menunjukkan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai pengembangan berkelanjutan yang bertanggung jawab bagi seluruh stakeholder perusahaan.

Menurut Winata, (2017), Laporan keberlanjutan di Indonesia masih bersifat sukarela, artinya perusahaan menerbitkannya tanpa ada kewajiban yang mengharuskan mereka untuk mempublikasikannya. Berbeda dengan laporan keuangan, yang memiliki aturan dan batasan yang jelas terkait penerbitannya.. Dalam bukunya yang berjudul "*Cannibals with forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*", Elkington (1997) pertama kali menggunakan istilah "laporan keberlanjutan" untuk menggambarkan bagaimana perusahaan berkelanjutan harus menerapkan tiga P: bukan hanya menghasilkan laba (profit), tetapi juga memperhatikan ketenteraman masyarakat (people), dan mempertahankan lingkungan (environment).

Laporan berkelanjutan akan menjadi sarana untuk membuat laporan ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Sustainability report* adalah laporan yang berdiri sendiri dan harus diluruskan karena banyak orang menganggapnya sebagai bagian dari laporan tahunan (Sejati & Prastiwi, 2015). Untuk memenuhi harapan pengungkapan yang terbuka, perusahaan harus memberikan informasi sustainability report yang mereka miliki. Karena

itu, laporan keberlanjutan sangat penting bagi manajer untuk berkomunikasi saat mereka bekerja.

2. *Global Reporting Initiative (GRI)*

Menurut Kurniawati *et al.*, (2022) *Global Reporting Initiative (GRI)* adalah sebuah organisasi internasional yang berpusat di Amsterdam, Belanda, yang fokus pada pengembangan standar untuk pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari pelaporan perusahaan. GRI didirikan pada tahun 1997 oleh *Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)* dan *Tellus Institute* di Amerika Serikat, dengan dukungan dari *United Nations Environment Programme (UNEP)*. Sekretariat pusatnya berada di Amsterdam, berfungsi sebagai koordinasi kegiatan operasional GRI. GRI juga memiliki cabang di Australia, Brasil, Cina, India, dan Amerika Serikat, serta menjalin hubungan dengan lebih dari 600 pemangku kepentingan perusahaan dan memiliki sekitar 30.000 anggota yang mewakili berbagai konstitusi dan sektor.

Eliyana, (2020) berpendapat bahwa *sustainability report* merupakan laporan yang tidak hanya memuat informasi kinerja keuangan saja melainkan informasi non kinerja keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan. Kemudian, sebagaimana dipromosikan oleh Standar GRI (2016), Pelaporan keberlanjutan merupakan praktik pelaporan organisasi secara terbuka mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, serta karena itu juga termasuk kontribusinya baik positif maupun negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

PSAK No. 1 menyebutkan bahwa entitas dapat pula menyajikan laporan tambahan yang berada diluar lingkup Standar Akuntansi Keuangan serta yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), terkhusus bagi industri

dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. *Sustainability report* merupakan laporan yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang diungkapkan sebagai pelengkap pelaporan keuangan yang dalam penyampaianya terpisah dari laporan keuangan perusahaan.

Pengungkapan triple bottom line dalam *sustainability report* tersebut, menurut Global Reporting Initiative (2016) dapat meningkatkan transparansi mengenai dampak kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan investasi bagi para stakeholders. *Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan pelopor lembaga non-pemerintah yang mengembangkan serta menyebarluaskan pedoman pelaporan berkelanjutan secara global yang dikembangkan melalui proses multi-stakeholder dengan menggabungkan partisipasi aktif dari bisnis, akuntansi, investasi, hak asasi manusia, penelitian serta organisasi tenaga kerja dari seluruh dunia (NCSR, 2021).

Terkait dengan *sustainability report* indikator yang digunakan untuk tahun 2013 hingga 2016 yaitu GRI-4, sedangkan di mulai dari tahun 2016 indikator yang digunakan adalah GRI Standards yang mana telah mengalami penambahan dan disesuaikan dengan perubahan kondisi global. GRI Standards 2016 terbagi menjadi dua kelompok utama yaitu standar universal yang mengatur tentang landasan, pengungkapan umum dan pendekatan manajemen yang dilambangkan dengan kode GRI 101, GRI 102 dan GRI 103 dan standar topik spesifik yang terdiri dari tiga aspek yang dituangkan dalam *sustainability report* adalah sebagai berikut:

a. Kinerja Ekonomi

Dimensi kinerja ekonomi dalam *sustainability report* di dalam GRI Standards 2016 di lambangkan dengan kode 200. Dimensi ekonomi berkelanjutan berkaitan dengan dampak organisasi pada kondisi ekonomi stakeholder dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional dan global. Aspek ekonomi yang dilaporkan dalam *sustainability report* lebih menekankan pada kontribusi perusahaan terhadap besar sistem ekonomi (Bukhori & Sopian, 2017). Dimensi ini meliputi kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, anti korupsi dan perilaku anti persaingan (Global Reporting Initiative (GRI) Standards, 2016).

b. Kinerja Lingkungan

Menurut *Global Reporting Initiative* (2016), *sustainability reporting* dalam aspek lingkungan di dalam GRI Standards 2016 di lambangkan dengan kode 300. Dimensi lingkungan berkelanjutan menyangkut dampak organisasi terhadap hidup dan non-hidup sistem alam, termasuk ekosistem, tanah, udara serta air (Bukhori & Sopian, 2017). Dimensi ini berkaitan dengan material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, air limbah dan limbah, kepatuhan lingkungan serta penilaian lingkungan pemasok.

c. Kinerja Sosial

Dimensi kinerja sosial dalam *sustainability report* di dalam GRI Standards 2016 di lambangkan dengan kode 400. Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial dimana organisasi beroperasi (Bukhori & Sopian, 2017) Dimensi ini membahas mengenai karyawan, hubungan tenaga kerja/manajemen, kesehatan & keselamatan kerja, pelatihan & pendidikan, keanekaragaman & kesempatan setara, non-diskriminasi, kebebasan berserikat & perundingan kolektif, pekerja anak, kerja paksa/wajib kerja, praktik keamanan, hak-hak masyarakat adat, penilaian hak asasi manusia, masyarakat lokal, penilaian sosial pemasok, kebijakan publik, kesehatan dan

keselamatan pelanggan, pemasaran dan pelabelan, privasi pelanggan serta kepatuhan sosial ekonomi (Global Reporting Initiative (GRI) Standards, 2016). Isi dan indikator wajib dari sustainability report berdasarkan GRI Standards dapat ditunjukkan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Pengungkapan Dalam Standar Global Reporting Initiative (GRI)

No.	Kode	Indikator
KATEGORI : EKONOMI		
GRI 201		Kinerja Ekonomi
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
2	201-2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
GRI 202		Keberadaan Pasar
5	202-1	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat local
GRI 203		Dampak Ekonomi Tidak Langsung
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
GRI 204		Praktik Pengadaan
No.	Kode	Indikator
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local
GRI 205	Anti-Korupsi	

10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi
12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
GRI 206	Perilaku Anti-Persaingan	
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli
GRI 207	Pajak	
14	207-1	Pendekatan terhadap pajak
15	207-2	Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak
16	207-3	Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak
17	207-4	Laporan per negara
KATEGORI : LINGKUNGAN		
GRI 301	Material	
18	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
19	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan
20	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya
GRI 302	Energi	
21	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi
22	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
23	302-3	Intensitas energi
24	302-4	Pengurangan konsumsi energi
No.	Kode	Indikator
25	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
GRI 303	Air dan Efluen	

26	303-1	Pengambilan air berdasarkan sumber
27	303-2	sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
28	303-3	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan Kembali
29	303-4	Pembuangan air
30	303-5	Konsumsi air
GRI 304	Keanekaragaman Hayati	
31	304-1	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
32	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
33	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi
34	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
GRI 305	Emisi	
35	305-1	Emisi gas rumah kaca (grk) langsung (cakupan 1)
36	305-2	Emisi gas rumah kaca (grk) energi tidak langsung (cakupan 2)
37	305-3	Emisi gas rumah kaca (grk) tidak langsung lainnya (cakupan 3)
38	305-4	Intensitas emisi gas rumah kaca (grk)
39	305-5	Pengurangan emisi gas rumah kaca (grk)
No.	Kode	Indikator
40	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)
41	305-7	Nitrogen Oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya
GRI 306	Air Limbah (Efluen) dan Limbah	
42	306-1	Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan

43	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
44	306-3	Tumpahan yang signifikan
45	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya
46	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air
GRI 307		Kepatuhan Lingkungan
47	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
GRI 308		Penilaian Lingkungan Pemasok
48	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
49	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
KATEGORI : SOSIAL		
GRI 401		Kepegawaian
50	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
51	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu
52	401-3	Cuti melahirkan
GRI 402		Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen
53	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
GRI 403		Keselamatan dan Kesehatan Kerja
No.	Kode	Indikator
54	403-1	Perwakilan pekerja dalam komite Kesehatan dan keselamatan kerja gabungan manajemen,pekerja yang resmi
55	403-2	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat pekerjaan, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender

56	403-3	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
57	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja
58	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
59	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
60	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
61	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
62	403-9	Kecelakaan kerja
63	403-10	Penyakit akibat kerja
GRI 404		Pelatihan dan Pendidikan
64	404-1	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
65	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
66	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
GRI 405		Keanekaragaman dan Kesempatan Setara
No.	Kode	Indikator
67	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
68	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
GRI 406		Non-Diskriminasi
69	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
GRI 407		Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif

70	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
GRI 408		Pekerja Anak
71	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
GRI 409		Kerja Paksa atau Wajib Kerja
72	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
GRI 410		Praktik Keamanan
73	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
GRI 411		Hak-Hak Masyarakat Adat
74	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
GRI 412		Penilaian Hak Asasi Manusia
75	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak
76	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
77	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
No.	Kode	Indikator
GRI 413		Masyarakat Lokal
78	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan
79	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat local
GRI 414		Penilaian Sosial Pemasok

80	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
81	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
GRI 415		Kebijakan Publik
82	415-1	Kontribusi politik
GRI 416		Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan
83	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
84	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
GRI 417		Pemasaran dan Pelabelan
85	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
86	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa
87	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
GRI 418		Privasi Pelanggan
88	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
GRI 419		Kepatuhan Sosial Ekonomi
No.	Kode	Indikator
89	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi

Sumber: *Global Reporting Initiative*

3. Tranparansi

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan (Renitasari, 2020). Sedangkan menurut Sangki et al., (2017) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

4. Prinsip – Prinsip Pelaporan *Sustainability Report*

Menurut GSSB (2016), perusahaan diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip pelaporan karena prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar untuk menghasilkan laporan keberlanjutan yang berkualitas. Prinsip-prinsip pelaporan dibagi menjadi dua kategori:

a) Prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan

Prinsip ini membantu perusahaan dalam menentukan konten yang akan disajikan dalam laporan. Berikut adalah komponen dari prinsip-prinsip tersebut:

1. Inklusivitas pemangku kepentingan

Perusahaan harus mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan menjelaskan bagaimana mereka merespons kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan tersebut.

2. Konteks keberlanjutan

Laporan harus menjelaskan perilaku perusahaan dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas.

3. Materialitas

Laporan wajib mencakup topik-topik berikut:

- (i) Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan bagi perusahaan.
- (ii) Topik yang mempengaruhi keputusan dan penilaian inti para pemangku kepentingan.

4. Kelengkapan

Laporan harus mencakup topik dan batasan material yang cukup untuk menggambarkan risiko ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta membantu pemangku kepentingan dalam memberikan penilaian pada periode pelaporan.

b) Prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan kualitas laporan

Prinsip ini berfungsi untuk memastikan keunggulan informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan. Kualitas informasi ini penting untuk membantu pemangku kepentingan dalam memberikan penilaian terhadap perusahaan dan membuat keputusan yang tepat. Berikut adalah komponen dari prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan kualitas laporan:

1. Akurasi

Informasi yang dilaporkan harus benar dan jelas agar pemangku kepentingan dapat menilai perilaku perusahaan.

2. Keseimbangan

Informasi harus mencakup dampak positif dan negatif dari perilaku perusahaan sebagai dasar penilaian.

3. Kejelasan

Perusahaan wajib menyampaikan informasi dengan cara yang dapat dipahami dan diakses oleh para pemangku kepentingan.

4. Keterbandingan

Perusahaan harus menyusun dan melaporkan informasi dengan cara yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menganalisis perilaku perusahaan dan membandingkannya dengan perusahaan lain.

5. Keandalan

Perusahaan harus mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi serta proses yang digunakan dalam penyusunan laporan.

6. Ketepatan waktu

Perusahaan harus melaporkan informasi secara rutin dan tepat waktu agar pemangku kepentingan dapat segera mengambil keputusan.

5. Akuntabilitas

Dalam pasal 7 Undang – undang No 28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat / rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan / kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pemimpin organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masayang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui :

- A. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan.
- B. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan.
- C. Penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Akuntabilitas menurut Novatiani et al. (2019) adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut Langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinberjanya. Pada prinsipnya, akuntabilitas sektor public adalah kepada Masyarakat dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan public yang dicapai sesuai targer (seperti pelayanan, Pendidikan, Kesehatan, air minum, sanitasi dan lain lain. Tingkat Akuntabilitas sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Teknis

Akuntabilitas teknis yaitu pertanggungjawaban terhadap input dan output atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiata pembangunan. Input meliputi sumber daya baik manusia, anggaran, fasilitas dan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output program. *Output* yaitu berbagai produk atau layanan tangible (berwujud/nyata) yang dihasilkan oleh suatu program yang berkontribusi kepada pencapaian berbagai tahapan outcome/ manfaat program.

2. Akuntabilitas Strategis

Akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban *outcomes* atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat Outcomes adalah hasil/ dampak yang ingin dicapai dalam bentuk perubahan pada kualitas hidup individu masyarakat, struktur sosial, atau lingkungan fisik akibat dari pelayanan publik atau intervensi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada setiap kerangka kerja program, tujuan program perlu dituliskan dalam pernyataan yang jelas serta bersinergi dengan tujuan kebijakan strategis dari pemerintah yaitu dalam bentuk pernyataan outcome. *Outcome* bisa saja merupakan

implikasi langsung dari produk suatu kegiatan atau output, namun dapat juga merupakan hasil pada tingkatan eksekusi yang lanjut dari suatu program kegiatan.

3. Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas Politik adalah pertanggungjawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan sosial/ekonomi/politik yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah.

6. Pengungkapan *Sustainability Report*

Pelaporan keberlanjutan yang mengacu pada standar GRI harus memberikan representasi yang seimbang dan adil mengenai kontribusi positif dan negatif organisasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Standar GRI menciptakan bahasa yang seragam antara organisasi dan para pemangku kepentingan, sehingga dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi dapat dikomunikasikan dan dipahami dengan baik. Laporan keberlanjutan berdasarkan GRI G4 Guidelines terdiri dari beberapa dimensi berikut:

1. Ekonomi

Dalam konteks standar GRI, dimensi ekonomi dari keberlanjutan berkaitan dengan dampak organisasi terhadap kondisi ekonomi pemangku kepentingannya, serta sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Standar ini mencakup aliran modal antara berbagai pemangku kepentingan dan dampak ekonomi utama dari sebuah organisasi di seluruh masyarakat. Topik yang diangkat dalam dimensi ini meliputi kinerja ekonomi, keberadaan pasar sosial organisasi, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, pencegahan korupsi, dan perilaku anti persaingan.

2. Lingkungan

Dimensi lingkungan dalam standar GRI berfokus pada dampak organisasi terhadap sistem alami yang meliputi elemen hidup dan tak hidup, seperti tanah, udara, air, dan ekosistem. Input yang digunakan untuk menghasilkan dan mengemas produk dan jasa organisasi dapat terdiri dari material tak terbarukan seperti mineral, logam, minyak, gas, dan batu bara, serta material terbarukan seperti kayu dan air.

3. Sosial

Dimensi sosial dari keberlanjutan mencakup dampak organisasi pada sistem sosial di mana organisasi beroperasi. Dimensi sosial terdiri dari sub-kategori berikut:

(i) Kepegawaian

Indikator kepegawaian mencakup hubungan antara tenaga kerja dan manajemen, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, serta keanekaragaman dan kesempatan setara.

(ii) Hak asasi manusia

Indikator kinerja hak asasi manusia memastikan bahwa organisasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan menjunjung asas kesetaraan, termasuk penerapan prinsip non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, serta perlindungan terhadap tenaga kerja anak, kerja paksa, praktik keamanan, hak-hak masyarakat adat, dan penilaian HAM.

(iii) Masyarakat

Indikator kinerja masyarakat menyoroti dampak organisasi terhadap komunitas di mana mereka beroperasi, serta tanggapan dari institusi sosial terkait dengan isu-isu seperti komunitas, korupsi, kebijakan publik, dan perilaku anti-kompetitif seperti monopoli.

(iv) Tanggung jawab atas produk

Indikator kinerja tanggung jawab produk meliputi aspek kesehatan dan keselamatan pengguna produk dan pelanggan, pemasaran dan pelabelan, perlindungan privasi pelanggan, serta kepatuhan terhadap norma sosial dan ekonomi

